

# *Menggali Warisan Hannah Arendt dalam “Asal-Usul Totalitarisme”*

Alois A. Nugroho

*ABSTRACT. Arendt's analysis of totalitarianism in The Origins of Totalitarianism has combined several dimensions of power: imperialism, racism, and anti-Semitism. Under these exercises of power, polis as a model of politics is reduced into the holocaust and colonization. This article finds out that those processes bring forth the society into the dichotomy between the pariah and the parvenu, the people and the mass, human qua human and human qua citizen, and the authentic and the unauthentic. This phenomenological analysis of the dichotomy shows that emotion may be the only sources of disturbances*

**KATA KUNCI.** Totalitarisme, rasisme, pariah, pervenu, massa, warga negara, yang otentik

## 1. PENDAHULUAN

*The Origins of Totalitarianism* ialah karya besar pertama Hannah Arendt, yang mulai ditulis pada 1944 dan dipublikasikan pada 1951. Buku itu terdiri dari tiga bagian yaitu, berturut-turut, Antisemitisme, Imperialisme dan Totalitarisme. Terjemahan karya ini ke dalam bahasa Indonesia dikerjakan oleh dua orang dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya Jakarta, yakni oleh penulis dan almarhum J.M. Soebijanta, dan diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Versi Indonesianya mengikuti pembagian buku itu dalam tiga babak. Jadi buku pertama berbicara tentang Antisemitisme, terbit 1993. Buku kedua berbicara tentang Imperialisme dan buku ketiga tentang Totalitarisme terbit tahun 1995.

Seperti lazim diketahui, Hannah Arendt tidak menulis filsafat secara sistematis. Dia tidak bertolak dari konsep-konsep besar dalam filsafat politik, semisal “otoritas”, “negara”, “kedaulatan”, “keadilan”, dan

semacamnya. Filsafatnya, di bawah pengaruh Heidegger dan Jaspers bertolak dari pengalaman konkret sehari-hari, dari “*lived world*” katakanlah, dengan taat asas pada adagium Husserl, “Kembalilah kepada benda-benda sendiri” (*Zurück zu den Sachen selbst*). Maka dalam karya “Asal-usul Totaliterisme” itu pun, Arendt bertolak dari pengalaman historis dan politis yang dialami Eropa berupa totalitarisme dalam bentuk Nazi-isme dan Stalinisme, yang dilihat akar-akarnya dalam pengalaman historis pula berupa imperialisme dan, lebih-lebih, antisemitisme.

## 2. FENOMENOLOGI DAN POSTMODERN?

Meskipun demikian, ada banyak pemikir politik postmodern yang menggali inspirasi dari fenomenologi politik Arendt, sehingga Arendt kadang-kadang tampak sebagai salah satu perintis filsafat politik postmodern. Hal ini juga tidak terlampau mencengangkan, kalau diingat bahwa Derrida, sebagai salah seorang kamiun postmodernisme kalau bukan malah tokoh utamanya, pun berangkat sebagai seorang Husserlian. Meskipun nihilisme postmodern tidak akan kita temukan dalam pemikiran Arendt, tetapi implikasi pemikirannya yang kritis terhadap dominasi “yang umum” atas “yang lain” atau “yang unik”, dengan sikap menjunjung tinggi “pluralisme”, merupakan mata air bergizi bagi para pemikir politik dengan kecenderungan postmodern atau pun bagi para pemikir politik yang mempertimbangkan secara serius pandangan-pandangan dari kubu postmodernis.

Namun kecondongan Arendt pada deliberasi publik bergaya – dalam istilah ahli komunikasi politik Dan Nimmo – “*town meeting*” (sebagai lawan dari gaya “humas” atau *public relation* yang relatif satu arah), sebagai pengejawantahan modern dari “polis” Yunani mendekatkannya pada proposal Habermas. Otentisitas setiap *zoon politikon* dalam partisipasi publik akan membuat otoritas yang muncul legitim dan kepatuhan yang menyertainya juga otentik, dalam arti tidak meniadakan “kebebasan” (*liberty*) dan “kesetaraan” (*equality*) setiap *zoon politikon*. Bahkan sampai tingkat tertentu, kalau disadari bahwa ada

pluralitas dari apa yang oleh Charles Taylor disebut "*moral source*",<sup>1</sup> atau oleh John Rawls disebut "*comprehensive doctrine*",<sup>2</sup> posisi Arendt tidak terlalu jauh dari Taylor, Rawls, bahkan Ricoeur. Meski pun tidak sebanyak dua nama yang lain itu, nama Arendt juga beberapa kali disebut dalam karya terakhir Ricoeur, *Reflections on the Just* (2007).<sup>3</sup> Mungkin dalam membuat genealogi pemikiran politik mutakhir, pada saatnya nanti kita harus menempatkan Arendt, bersama dengan Ricoeur, Taylor, dan Rawls, sebagai pemikir yang berupaya "menengahi" dan sekaligus "mengatasi" dialektika antara modernisme dan postmodernisme.

### 3. DARI ANTISEMITISME KE TOTALITARISME

Seperti sudah disinggung di depan, *The Origins of Totalitarianism* terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menguraikan bangkitnya Antisemitisme di Eropa Barat dan Eropa tengah pada awal dan pertengahan abad 19 sebagai kebangkitan gerakan massa yang rasistis. Diskriminasi sosial terhadap orang Yahudi semakin menjadi-jadi justru ketika secara politik, sejak kemenangan Napoleon, telah dicanangkan emansipasi. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah berasimilasi (katakanlah Yahudi *parvenu*) sejak kemenangan Napoleon itu harus dengan susah payah membedakan diri dari Yahudi "biasa" (katakanlah Yahudi "pariah").

Situasi historis semacam ini terlihat jelas dalam kasus yang dialami oleh seorang Yahudi *parvenu* Perancis yang bernama Alfred Dreyfus, bahkan dalam kasus yang dialami oleh Yahudi *parvenu* yang berhasil menjadi Perdana Menteri Inggris, Benjamin Disraeli. Karena takut disamaratakan dengan Yahudi "pariah", para "parvenu" Yahudi ini tidak jarang ikut mengamini gerakan antisemitisme. Itu sebabnya, karya Arendt ini bisa ditafsirkan sebagai otokritik terhadap orang Yahudi sendiri, yakni bahwa mereka tidak dapat sama sekali "cuci tangan" dalam gerakan antisemitis yang berujung pada peristiwa *holocaust*.

Buku kedua menguraikan bangkitnya imperialisme yang menggunakan

rasisme sebagai “senjata ideologis” dengan menggagaskan perlunya “pemerintahan oleh ras-ras unggul” atas “ras-ras inferior”. “Imperialisme mendorong perlunya menciptakan rasisme sebagai satu-satunya ‘penjelasan’ yang mungkin serta ‘excuse’ bagi tindakan-tindakannya, sekalipun seandainya di dalam dunia beradab sebelumnya tidak pernah ada pemikiran-ras”,<sup>4</sup> begitu tulis Hannah Arendt.

Padahal, kepentingan yang ada di balik itu semua sesungguhnya adalah keperluan para kapitalis untuk mencari faktor-faktor produksi selain modal (*material, manpower*) atau - dalam kasus imperialisme Inggris - mencari pasar (*market*) ke luar teritori negara, bahkan jauh melintasi batas benua. Hal ini terjadi karena Eropa abad 19 mengalami surplus modal, karena akumulasi kapital telah mencapai tingkat sedemikian sehingga pasar dalam negeri menjadi jenuh-modal.

Borjuasi yang memegang kendali imperialisme mencari pemecahan masalah dengan melakukan ekspansi demi ekspansi ke seluruh dunia [kelak, proses ini tak lagi mengambil bentuk kolonisasi melainkan “globalisasi pasar” dengan episentrum tidak lagi di Eropa tetapi di Amerika Utara]. Sebenarnya, kecenderungan imperialisme dan kapitalisme ini melumpuhkan konsep dan praktek “negara-bangsa” (*nation-state*) yang sifatnya teritorial dan mengerogoti kewibawaan atau otoritas institusi-institusi negara nasional.<sup>5</sup> Tidak seperti yang diramalkan oleh Marx, redupnya peran negara tidaklah merupakan hasil kerja kaum proletar yang berhasil mewujudkan “masyarakat tanpa kelas”, melainkan hasil kerja kaum borjuis melalui proyek imperialisme.

Yang juga penting disebut dalam membahas Imperialisme ini ialah imperialisme yang melakukan ekspansi tidak di luar benua, melainkan di dalam benua Eropa sendiri. Oleh Arendt, gerakan ini disebut “gerakan Pan”, dengan kasus utama “Pan-Slavia” dan “Pan-Jermania”. Rasisme merupakan ideologi penting bagi gerakan Pan-Slavia yang dipimpin Rusia serta gerakan Pan-Jermania yang dipimpin Jerman, karena legitimasi dari gerakan militer untuk memperluas teritori langsung dihubungkan dengan kesamaan “ras” dari penduduk yang mendiami wilayah-wilayah yang akan ditaklukkan. Gerakan Pan tidak pertama-tama bersifat pragmatis borjuis, melainkan “irasional”

massal.

Ini semua membawa tergerusnya legitimasi otoritas nasional dan tersisihnya tindakan politis demokratis, yakni tindakan deliberasi rasional secara kolektif. Yang tumbuh subur ialah rezim-rezim yang tidak mendasarkan diri pada legitimasi berlandaskan konsensus deliberatif, melainkan konformitas berdasarkan terror atau rasa takut. Rezim Nazi di Jerman dan rezim Stalin di Rusia adalah dua kasus totaliter, yang sama-sama secara irasional melihat ras Yahudi - yang dipersepsi sebagai ras yang menyadari diri sebagai "ras terpilih" - sebagai "pesaing". Totalitarianisme ini, yakni rezim yang ingin berekspansi dan mendominasi seluruh dunia, mengatur seluruh aspek kehidupan warganya hampir tanpa basis legitimasi yang demokratis sama sekali, selain konformitas yang muncul dari rasa takut. "Teror bukan sarana untuk menakut-nakuti atau memusnahkan lawan, melainkan sebagai sarana untuk mengendalikan massa rakyat yang sungguh-sungguh 'patuh' <sup>6</sup>, demikian tulis Hannah Arendt.

#### 4. PEMBEDAAN FENOMOLOGIS

##### 4.1. "PARIAH" DAN "PARVENU"

Arendt meminjam istilah-istilah ini dari wartawan Perancis dari peralihan abad 19 dan abad 20 yakni Bernard Lazare yang, dalam melaporkan kasus Dreyfus, berada di pihak pembela Dreyfus – seorang perwira Yahudi dalam dinas ketentaraan Perancis yang difitnah bahwa ia adalah seorang agen rahasia Jerman dan dijatuhi hukuman. Pada waktu itu, tentara, dan *clergy*, beserta elite pendukung monarkisme serta massa, memiliki sikap antisemitis yang kental.

Arti asli dari istilah "*pariah*" sebenarnya adalah lapisan di luar kasta dalam Hinduisme tradisional. Arti ini dipakai Arendt untuk mengacu orang-orang yang dipinggirkan, dimarginalkan dan diperlakukan dengan "rasa jijik" oleh masyarakat karena ke-lain-annya (*otherness*). *Parvenu*, yang arti aslinya "orang kaya baru" (OKB), sebaliknya, mengacu pada orang-orang (terutama yang asal-usulnya "marginal") yang menyesuaikan diri melalui konformitas

(dan bukan konsensus) dengan cara hidup masyarakat yang dominan. Bagi “*pariah*”, masih ada perbedaan antara “yang privat” dan “yang publik”. Bagi “*parvenu*” hanya ada “yang sosial”, tidak ada perbedaan dan pemisahan antara “yang privat” dan “yang publik”.

Dalam bagian “Antisemitisme” dari *The Origins of Totalitarianism*, ras Yahudi di Eropa sebenarnya diperlakukan pada umumnya sebagai “*pariah*”. Namun di kalangan ras Yahudi di Eropa itu sendiri dapat dibedakan yang “*pariah*” dan yang “*parvenu*”. Baik di Perancis, Jerman dan Austria pada awal abad 20, ada lapisan Yahudi yang kaya, yang dikagumi dan lebih dulu mengalami emansipasi (kalau dalam sistem sosial imperialisme Belanda di Hindia Timur, mungkin dapat dipadankan dengan *gelijkgesteld*). Mereka dikagumi karena “lain”, artinya “eksotis”, namun memiliki keunggulan yang membedakan mereka dengan yahudi “*pariah*”. Kaum Yahudi “*pariah*” ini biasanya imigran, terutama dari Eropa Timur (*Ostjuden*).

Pembedaan “*pariah*” dan “*parvenu*” dari Arendt ini sangat penting dalam filsafat politik masa kini, misalnya pada filsafat politik Slavoj Žižek dan Giorgio Agamben.<sup>7</sup> Agamben, misalnya, membedakan “*zoe*” dan “*bios*”, “*human qua human*” dan “*human qua citizen*”, yang dapat dilihat dalam paralelismenya dengan “*pariah*” dan “*parvenu*”. Sheyla Benhabib menggunakannya untuk kepentingan feminisme. Dari sini, tampak bahwa konsep “*pariah*” memuat kemungkinan sebagai sumber pembebasan – setidaknya dalam pemikiran Slavoj Žižek - yakni pembebasan dari kekerasan simbolis yang sering dilakukan “*self*” terhadap diri sendiri akibat tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan dari luar, akibat kegagalan menarik batas antara keunikan “yang privat” dengan standardisasi atau normalisasi “yang publik”. Dalam arti ini, menjadi manusia “*pariah*” sebenarnya dekat dengan konsep menjadi manusia “otentik” dalam “fenomenologi”.

#### 4.2. RAKYAT DAN MASSA

Pembedaan lain yang juga penting untuk digali dari *The Origins of Totalitarianism* ialah perbedaan antara “rakyat” dan “massa”. Dua pengertian

itu, kata Arendt, sering dicampuradukkan. Kalau ada anggapan bahwa propaganda dan kampanye dapat menghasilkan apa saja dan bahwa orang dapat dibuat yakin hanya dengan pernyataan-pernyataan yang dibawakan dengan suara cukup keras dan gaya memukau, dan orang menganggap benar "*vox populi vox Dei*", sehingga tugas pemimpin ialah menuruti suara itu secara bijaksana, maka kemungkinan besar kerancuan itu telah terjadi. Arendt menulis,

Kerumunan massa pada hakikatnya merupakan sebuah kelompok yang mewakili ampas-ampas semua kelas masyarakat. Hal ini membuat kita begitu mudah menyamakan kerumunan massa dengan rakyat, sebab rakyat juga terdiri dari semua lapisan masyarakat.<sup>8</sup>

Rakyat itu terdiri dari manusia otentik, manusia dalam pengertiannya yang penuh. Dalam politik, mereka tidak hanya berbuat, melainkan bertindak. Dengan bertindak berarti ikut menentukan tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan, tidak ada yang *taken for granted*. Namun tidak hanya itu, partisipasi itu dijalankan dalam deliberasi publik secara rasional, yang menyangkut juga dalam hal pemilihan dan perwujudan nilai-nilai. Itu sebabnya, "rakyat dalam semua revolusi besar berjuang untuk memperoleh perwakilan yang sejati"

Sebaliknya, kerumunan massa senantiasa menyerukan perlunya tampil "orang kuat", "pemimpin besar", dan cenderung kepada kegiatan-kegiatan ekstralegal, ekstraparlementer, dan ekstraparlementer, bukan sebagai pilihan terakhir yang dijalankan setengah terpaksa, melainkan sebagai andalan utama yang dijalankan pada kesempatan pertama. Bagi Arendt, pengertian "rakyat" berhubungan dengan "rasionalitas" untuk bersama-sama mengupayakan "yang baik", "yang tepat", "yang adil", "yang benar", untuk mengatur kehidupan bersama. Struktur teleologis semacam ini (meminjam Ricoeur) tidak ada dalam pengertian "massa".

Massa itu nihilistik. Kekuasaan itu sebenarnya sarana untuk mewujudkan bersama "yang adil", "yang benar", "yang baik". Nihilisme politik melihat struktur teleologis ini tak ada, artinya berhenti pada sarana, atau melihat sarana

sebagai tujuan. Siapa yang berkuasa dianggap sebagai pada dirinya sendiri identik dengan “yang baik”, “yang adil”, “yang benar”. Legitimasi moral bagi tiap kekuasaan adalah dirinya sendiri. *Might is right*. Pemimpin bukanlah dia yang secara rasional mengajak mengupayakan “yang baik”, “yang benar”, “yang adil”, melainkan dia yang kuat secara fisik, secara sosial, secara finansial. Bahkan plebisit dipakai untuk meredam rasionalitas ini.<sup>10</sup>

Seorang yang *enlightened* seperti Clemenceau melihat kecenderungan itu, meski dia masih menggunakan kata “rakyat” untuk mengacu dua pengertian itu.

Dengan persetujuan terbuka dari rakyat [artinya massa], mereka memproklamasikan di depan dunia kegagalan ‘demokrasi’ mereka. Melalui mereka, rakyat yang berdaulat didepak dari tahta keadilannya, dilucuti dari kekuasaannya yang mutlak. Karena tidak dapat disangkal lagi bahwa kejahatan ini menimpa kita dengan bantuan penuh dari rakyat [artinya massa] sendiri...Rakyat bukanlah Tuhan. Setiap orang dapat meramalkan bahwa keilahian baru ini suatu hari akan tumbang. Sebuah tirani kolektif, yang meruyak di seluruh negeri, tidak lebih cocok dibanding seorang tirani tunggal yang menganggangi tahtanya.<sup>11</sup>

Tidak gampang menghadapi massa dan mempunyai pendapat yang bertentangan dengan “pendapat umum”. Dalam kasus Dreyfus, orang semacam itu ialah pengarang besar bernama Emile Zola. Clemenceau menulis tentang Zola, dalam larik-larik yang mirip dengan yang ditulis Soren Kierkegaard tentang “massa” dalam salah satu catatan hariannya:

Banyak orang terbukti berani melawan raja-raja yang amat berkuasa [dalam hal Kierkegaard, Paus] dan menolak untuk membungkuk di depan mereka, namun sedikit saja yang berani melawan kerumunan orang, berdiri sendirian melawan massa yang salah jalan, menghadapi hiruk pikuk mereka yang kepala batu, tanpa senjata dan dengan tangan terlipat berani mengatakan ‘tidak’ ketika yang dituntut adalah sebuah ‘ya’. Orang semacam itu ialah Zola.<sup>12</sup>

Otoritas masih lebih mudah dihadapi dibanding massa. Karena



itu, pemerintahan totaliter, bahkan juga pemerintahan otoriter, sering memanfaatkan massa ini untuk melakukan teror.

#### 4.3. BERSATUNYA "MODAL" DENGAN "MASSA": HILANGNYA "PERTENTANGAN KELAS"

Dikhotomi Marxis yang mempertentangkan "kapitalis" atau "borjuis" dengan "proletar", atau yang dapat dirumuskan ke dalam faktor produksi sebagai "modal" dengan "tenaga kerja", telah menyisih pada era imperialisme. Surplus modal ke negeri-negeri jauh ternyata diikuti pula dengan surplus tenaga kerja. Buruh dan borjuasi membaaur, mereka punya kepentingan yang sama dalam politik imperialis. Di negeri-negeri koloni, masyarakat tanpa kelas muncul tidak di negeri induk dan tidak diprakarsai oleh "revolusi proletar" jenis apa pun – berbeda dengan yang pernah digariskan Marx - selain kepentingan bersama untuk mengekspor surplus modal dan surplus tenaga kerja dengan mengeksploitasi kekayaan negeri lain.

Surplus tenaga kerja ini, dalam pandangan Arendt, bahkan sudah lebih tua dari surplus modal. Surplus tenaga kerja ini muncul berbarengan dengan kapitalisme sendiri. Penemuan mesin-mesin baru dalam revolusi industri meningkatkan surplus tenaga kerja atau meningkatkan angka pengangguran. Pengangguran adalah "hasil samping produksi kapitalis yang lebih tua dari surplus modal". Para penganggur adalah "sampah masyarakat" yang dienyahkan dari masyarakat yang produktif setiap kali terjadi krisis, yang selalu menyertai setiap periode pertumbuhan industri.

Orang-orang yang secara permanen menganggur tidaklah berguna bagi masyarakat [...] Meski orang macam itu sungguh merupakan ancaman bagi masyarakat, toh disadari pula bermanfaat untuk membuka pemukiman-pemukiman di Negara-negara dominion Kanada, Australia, serta Amerika Serikat. Fakta baru dalam era imperialisme ialah bahwa kedua hal yang berlebihan ini, yaitu surplus modal dan surplus angkatan kerja, bahu-membahu dan pergi ke luar negeri bersama-sama.<sup>13</sup>

Dalam era imperialisme, massa yang dilahirkan dari akumulasi modal yang melewati titik jenuh, senantiasa menyertai modal itu dalam kembara penjelajahannya, untuk mencari peluang-peluang baru dalam investasi.

#### 4.4. MANUSIA DAN WARGA NEGARA

Pembedaan ini dapat dirumuskan pula dengan manusia sebagai manusia (*human qua human*) dan manusia sebagai warga negara (*human qua citizen*). Pembedaan ini dapat ditemukan ketika Arendt mengomentari “Deklarasi tentang Hak-hak Manusia” (*Declaration of Human Rights*) yang dikeluarkan pada penghujung abad ke-19. Deklarasi ini merupakan titik penting dalam sejarah, karena menegaskan bahwa hak-hak manusia “tak dapat dicabut” dan bukan merupakan penjabaran dari hak-hak atau hukum-hukum lain. Secara teoretis, hak-hak ini melekat pada “manusia sebagai manusia”, bahkan seandainya seseorang itu bukan “warga” dari suatu “negara”. Sebelum seseorang menjadi “warganegara” dan punya “hak warganegara” (“hak nasional”), siapa pun sudah harus menghormati hak-hak orang itu sebagai manusia.

Kesulitannya ialah, demikian Arendt, meskipun dalam teori, hak-hak manusia itu datang lebih dulu daripada hak nasional, namun dalam praktik, hak nasional diandaikan lebih dulu agar “hak-hak manusia” itu ada yang menjamin. Inilah yang dihadapi orang-orang Yahudi di Eropa pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Orang-orang Yahudi yang terusir dari Rusia dan menjadi “tuna negara” (*stateless*), jadi tidak lagi memiliki “hak nasional”, tidak menemukan hukum yang dapat membela “hak-hak manusia” mereka. Begitu juga orang-orang Yahudi yang diusir Hitler dari Jerman, mengungsi dan menjadi “tuna negara” di luar Jerman, kemudian dimasukkan lagi ke Jerman tatkala tentara dan polisi Hitler menyerbu para tetangganya, adalah orang-orang yang tak punya “hak nasional”, karena itu tidak dilindungi hukum apa pun, sehingga rezim Nazi dapat melanggar “hak-hak manusia” kaum Yahudi itu dengan memasukkan mereka ke dalam kamp-kamp konsentrasi, bahkan

kamar-kamar gas dimana hak paling asasi mereka, yaitu hak hidup, dianggap tidak ada.

#### 4.5. "YANG OTENTIK" DAN "YANG TAK OTENTIK"

Seperti sudah disinggung sebelumnya, di belakang pembedaan "manusia" dan "warganegara", "pariah" dan "parvenu", "rakyat" dan "massa", sebenarnya secara implisit ada pembedaan fenomenologi eksistensial antara "yang otentik" dan "yang tak otentik". Bahkan bisa dikatakan pula, bahwa bersatunya kapitalis dan massa, sebagai wujud surplus modal dan surplus tenaga kerja, dalam negeri-negeri yang dikolonisasi juga merupakan kebersamaan yang "tak otentik".

Dalam distingsi "rakyat" dan "massa", pembedaan implisit itu segera tampak, dengan "rakyat" di kolom "yang otentik" dan "massa" di kolom "yang inotentik". Pembedaan implisit itu juga segera saja tampak, apabila pengertian "*parvenu*" diperhatikan. *Parvenu* berperilaku sesuai dengan harapan atau ekspektasi lingkungan sosial dengan mengorbankan keunikannya, sehingga konsep "*parvenu*" itu pun berada di kolom "yang tak otentik".

Kalau saja kita ganti lingkungan sosial dengan lingkungan politik atau negara, dan ekspektasi negara dengan norma-norma hukum, maka juga akan kelihatan segera, bahwa konsep "warganegara" berada dalam kolom yang sama dengan konsep "*parvenu*". Meski pun di sini serta merta harus diperhatikan adanya perbedaan yang penting dengan "*parvenu*", karena menjadi "warganegara", meski harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi politik yang berupa norma legal, tidak harus dengan sendirinya tak otentik, lebih-lebih dalam masyarakat dimana deliberasi publik sudah menjadi kebiasaan dan pemilihan umum betul-betul berlangsung secara berkualitas. Menaati hukum dalam suatu negara yang betul-betul demokratis, dimana pemilu terlaksana sedemikian sehingga secara tidak langsung rakyat berpartisipasi dalam membuat norma hukum, tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan "tak otentik".

Sebaliknya, dalam negara yang tidak demokratis atau melaksanakan suatu sistem kuasi-demokratis – seperti misalnya di Eropa Timur sebelum bertiupnya “*the wind of change*” - konsep “manusia sebagai manusia” menjadi penting, seperti ditunjukkan oleh Slavoj Zizek. Di situlah manusia dapat menemukan oasis kebebasannya serta menyusun strategi emansipasinya dari dominasi negara dan aparat-aparat negara, setidaknya “bila tiba saatnya” (*in due time*). Konsep “*pariah*”, sejauh tidak dilepaskan dari unsur yang membedakannya dengan “*parvenu*”, yakni bahwa “pariah” mengacu pada jenis manusia yang tidak latah menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan opini yang dominan, dapat amat membantu. Meski ada konotasi “dipinggirkan dari masyarakat”, pariah mengandung janji pembebasan dari dominasi dan mengandung janji perbaikan masyarakat ke arah “yang adil”, setidaknya “bila saatnya tiba”.

Analisis yang secara eksplisit menggunakan pasangan pengertian yang “otentik” dan “yang tak otentik”, dan yang - seperti halnya *The Origins of Totalitarianism* – menganalisis akar-akar totaliterisme, namun kali ini dari sudut psikologi sosial, adalah analisis Erich Fromm dalam *Escape from Freedom*.<sup>14</sup> Seperti halnya Arendt, dalam karyanya itu Fromm juga mencoba menjelaskan masyarakat Eropa, utamanya Jerman, pada zaman Nazi Hitler. Namun pada Fromm, sorotannya terutama menggunakan perspektif Mazhab Frankfurt, yang mengkombinasikan sudut pandang Psikoanalisis Freud dengan sudut pandang Filsafat Sosial Marx. Akseptasi masyarakat umum Eropa terhadap gerakan Hitler merupakan obyek observasi Erich Fromm. Bagi Fromm, mayoritas masyarakat Eropa tergolong kelas menengah-bawah, sehingga mengidap situasi psikologis tertentu, yang secara sosial kemudian membuat mereka lebih rentan terhadap bujukan ideologi Nazi-isme.

Kalangan kelas menengah saat itu secara psikologi sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang takut “turun kelas” dan ingin sekali “naik kelas”. Mereka itu *craving for fame* serta *craving for money*, mengejar ketenaran dan mengejar uang, untuk dapat “naik kelas”. Demi kesuksesan, mereka ingin sekali diterima dalam masyarakat, dalam “pasar personalitas”, sehingga mereka meninggalkan otentisitas pribadi dan menggantinya dengan “kepribadian”

yang diterima oleh pasar. Mereka lebih dari sekadar bersedia untuk menjadi apa yang oleh Arendt disebut sebagai *parvenu*.

Dengan demikian, mereka membiarkan diri menjadi "tidak otentik". Mereka melakukan "kekerasan" terhadap diri sendiri demi suatu "kesuksesan". Mereka memacu hidup melebihi batas, sehingga mengaburkan batas antara pengalaman "sakit" dan "nikmat". Fromm menyebut karakter mereka ini "sodomasokhistic". Kalangan ini tidak mencintai hidup yang otentik, kalangan ini tidak memiliki sikap *biophily*. Sikap dominan mereka ialah *necrophily*, cinta kepada jasad atau orang mati.

## 5. KESIMPULAN

Sebagai sebuah refleksi sebenarnya tulisan ini belum selesai. Tulisan ini memang tidak dimaksud sebagai laporan bacaan atau ringkasan, melainkan sebagai upaya menggali hal-hal yang dapat dipelajari dari kekayaan pemikiran yang diwariskan oleh Hannah Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism*. Pemikiran Arendt bukanlah pemikiran yang sistematis, sehingga untuk memahaminya lengkap dengan seluruh nuansa kekayaannya sebenarnya dibutuhkan usaha mendekati dengan membuat rangkuman karyanya. Namun masalahnya adalah, tidak mudah merangkumkan sebuah rincian sejarah politik yang demikian kaya hanya dalam beberapa halaman saja. Maka beberapa topik yang menarik dipetik hampir secara spontan.

Asal usul, atau lebih tepat, sebab musabab dari totaliterisme ialah rasisme yang berpadu dengan imperialisme, utamanya imperialisme dalam bentuk gerakan "Pan", bercampur dengan kapitalisme yang juga memperanakan imperialisme. Tenaga di balik semua hal yang bercampur baur itu bukanlah rasionalitas, melainkan nafsu dan emosi. Berkaitan dengan itu, secara psikologis sangatlah penting membedakan kondisi manusia "otentik" dan kondisi manusia "tidak otentik", karena kondisi manusia-manusia yang "tidak otentik" bersifat kondusif bagi munculnya totaliterisme. Masyarakat akan terhindar dari totaliterisme, hanya kalau individu-individu berupaya

sekuat tenaga menjadi manusia “otentik”.

Kondisi manusia otentik ialah manusia yang tidak hanya bekerja (asal hidup), tidak hanya berkarya (menciptakan lingkungan lebih teratur dan nyaman), tetapi lebih-lebih beraksi, dalam arti – meminjam ungkapan Paulo Freire - “menciptakan masyarakat dan sejarah dengan tangan sendiri”. Kondisi manusia otentik ialah manusia yang mendengarkan suara alteritas dalam suara batin sendiri, atau disebut juga kondisi “*two in one*”, namun juga menghargai alteritas dalam kehidupan sosial dan politik dengan berupaya menciptakan masyarakat historis yang multikultural, artinya yang dalam kemajemukan *moral sources* atau *comprehensive doctrines* dapat hidup berdampingan dengan adil.

#### CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Charles Taylor, *Sources of the Self* (Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2003), hal. 91-110.

<sup>2</sup> John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993).

<sup>3</sup> Paul Ricoeur, *Reflections on the Just* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 2007), hal. 45-57, 198-212, 249-256.

<sup>4</sup> Hannah Arendt a.b. Alois A. Nugroho dan J.M. Soebijanta, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 117.

<sup>5</sup> Kelak, seorang pemikir dari kalangan borjuasi yang bernama Kenichi Ohmae dengan *jumawa* mengatakan bahwa globalisasi pasar telah sukses menyebabkan “*the end of the nation-states*” dan mencapai “*the borderless world*”.

<sup>6</sup> Hannah Arendt, a.b. J.M. Soebijanta, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid III* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 6.

<sup>7</sup> Robertus Robet, *Pandangan tentang “Yang Politis”*. Suatu Tanggapan terhadap Konsepsi Subyek dan Tindakan dalam Pemikiran Slavoj Žižek, disertasi untuk mencapai gelar Doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2008.

<sup>8</sup> Hannah Arendt, a.b. Alois A. Nugroho, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid I* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 172.

<sup>9</sup> Revolusi 1945 dan reformasi 1998 dapat dilihat sebagai kasus perjuangan memperoleh perwakilan yang sejati ini. Berhasil atau tidak itu lain soal. Masalah sekarang adalah banyak caleg dan banyak pemilih tidak “bertindak” (*to act*) dalam proses pemilu, melainkan “bekerja” (*to work*). Dalam hal caleg, motif untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif kadang-kadang hanya untuk mencari nafkah. Dalam hal simpatisan yang ikut kampanye, tak jarang motif untuk ikut berkampanye adalah untuk mendapat sekadar “uang transport”. Politik seharusnya dalam filsafat Hannah Arendt masuk

dalam kategori "tindakan" (*action*), tetapi dalam praktik politik kita dalam contoh-contoh di atas, politik telah digembosi menjadi semata-mata bekerja (*labour*) untuk mencari nafkah.

<sup>10</sup> Hannah Arendt, a.b. Alois A. Nugroho, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid I* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 181.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 183.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 184.

<sup>13</sup> Arendt, Hannah, a.b. Alois A. Nugroho dan J.M. Soebijanta, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 54.

<sup>14</sup> Erich Fromm, *Escape From Freedom* (New York: Henry Holt & Co., 1969)

## DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. (1960) *The Origins of Totalitarianism*. New York: Meridian Books
- \_\_\_\_\_. (1993) a.b. Alois A. Nugroho, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- \_\_\_\_\_. (1995) a.b. Alois A. Nugroho dan J.M. Soebijanta. *Asal-Usul Totaliterisme Jilid II*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- \_\_\_\_\_. (1995) a.b. J.M. Soebijanta, *Asal-Usul Totaliterisme Jilid III*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fromm, Erich. (1969) *Escape From Freedom*. New York: Henry Holt & Co.
- Rawls, John. (1993) *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press
- Ricoeur, Paul. (2007) *Reflections on the Just*. Chicago & London: The University of Chicago Press
- Robet, Robertus. (2008) *Pandangan tentang "Yang Politis". Suatu Tanggapan terhadap Konsepsi Subyek dan Tindakan dalam Pemikiran Slavoj Žižek*, disertasi untuk mencapai gelar Doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara.
- Taylor, Charles. (2003) *Sources of the Self*. Cambridge & New York: Cambridge University Press